



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

**SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien serta melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pencipta arsip perlu membuat sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis Dewan Perwakilan Rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Dewan Perwakilan Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

43

4

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39);
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Am

R

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini yang dimaksud dengan:

1. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal merupakan aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Arsip Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Sekretariat Jenderal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
4. Unit Kearsipan adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
5. Unit Pengolah adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.
6. Klasifikasi adalah proses identifikasi dan pengelompokan kategori kegiatan dan arsip dinamis yang dihasilkan.

Jan

H

7. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah kategori kerahasiaan informasi Arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
8. Akses Arsip Dinamis adalah kategori pembatasan akses terhadap Arsip berdasarkan kewenangan penggunaan Arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
9. Biasa adalah Klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun
10. Terbatas adalah Klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
11. Rahasia adalah Klasifikasi informasi dari Arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro. Apabila informasi yang terdapat pada Arsip bersifat sensitif bagi lembaga/organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.
12. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang apabila dipertimbangkan bahwa membuka informasi publik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini adalah sebagai acuan Klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- (2) Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini bertujuan untuk menyediakan informasi Arsip yang dapat diakses oleh publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menjamin keamanan Arsip bagi Informasi yang dikecualikan.

BAB II KLASIFIKASI ARSIP DINAMIS

Pasal 3

- (1) Arsip Dinamis berdasarkan fungsi dapat dikelompokkan ke dalam:
 - a. fungsi substantif; dan
 - b. fungsi fasilitatif.
- (2) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah fungsi yang merupakan kegiatan pokok/utama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah fungsi penunjang untuk melengkapi dan memperlancar kegiatan pokok/utama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (4) Fungsi Substantif dan fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Pasal 4

- (1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis mengacu pada kebijakan Klasifikasi Arsip Dinamis dengan menggunakan kode Klasifikasi Arsip Dinamis dalam bentuk gabungan huruf dan angka.

Am

h



- (2) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan fungsi unit kerja dan berfungsi sebagai dasar pemberkasan dan penataan Arsip.
- (3) Kebijakan Klasifikasi Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

BAB III KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS

Pasal 5

- (1) Penentuan Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis didasarkan pada tingkat keseriusan dampak dari informasi yang dipergunakan pihak yang tidak berhak.
- (2) Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) tingkat yaitu:
 - a. Biasa;
 - b. Terbatas; dan
 - c. Rahasia.
- (3) Penentuan tingkat Klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui analisis risiko dan disesuaikan dengan kepentingan dan kondisi setiap pencipta Arsip.

Pasal 6

Tingkat Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dibedakan berdasarkan teknis pengamanan dan pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat Klasifikasi informasinya semakin tinggi tingkat pengamanannya dan semakin tinggi tingkat Klasifikasi informasinya semakin ketat dalam pengaturan aksesnya.

BAB IV HAK AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 7

- (1) Pencipta Arsip melakukan penentuan dan Klasifikasi hak akses Arsip Dinamis.
- (2) Hak Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi :
 - a. pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
 - b. publik.
- (3) Pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya dapat mengakses Arsip yang berada pada tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya.
- (4) Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat mengakses Arsip dengan kategori terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Pasal 8

Hak Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:

- a. hanya dapat diakses oleh pejabat/pegawai yang mempunyai kewenangan;
- b. pejabat yang lebih tinggi kedudukannya dapat mengakses Arsip yang dibuat oleh pejabat/pegawai di bawahnya sesuai dengan hierarki kewenangannya dalam struktur organisasi; dan
- c. pejabat/pegawai yang kedudukannya setara atau dibawahnya tidak dapat mengakses Arsip yang dibuat oleh pejabat di atasnya kecuali sebelumnya telah diberikan izin oleh pejabat yang berwenang.

BAB V PENGAMANAN ARSIP DINAMIS

Pasal 9

- (1) Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan fisik dan informasi Arsip berdasarkan Klasifikasi keamanannya.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan sarana dan prasarana meliputi:

tu

h



- a. perangkat keras (*hardware*); dan
 - b. perangkat lunak (*software*).
- (3) Perangkat keras (*hardware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. sarana penyimpanan Arsip konvensional berupa:
 1. *filing cabinet*/rak arsip; dan
 2. brankas atau lemari besi.
 - b. sarana penyimpanan Arsip media baru berupa lemari Arsip sesuai dengan tingkat Klasifikasi informasi; dan
 - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat Klasifikasi informasi.
- (4) Perangkat lunak (*software*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. daftar Arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
 - b. aplikasi pengelolaan Arsip aktif dan inaktif.
- (5) Ruang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilengkapi dengan fasilitas pengamanan berupa kamera pengawas, kunci pengamanan ruangan, tabung pemadam kebakaran, dan/atau media simpan Arsip.

Pasal 10

- (1) Pengamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Arsip dengan kategori Biasa disimpan pada *filing cabinet*/rak arsip;
 - b. Arsip dengan kategori Terbatas disimpan pada *filing cabinet*/rak arsip; dan
 - c. Arsip dengan kategori Rahasia disimpan pada brankas atau lemari besi.
- (2) Unit Pengolah dalam pelaksanaan pengamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi pengelolaan barang milik negara.

Pasal 11

- (1) Pengamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh pejabat fungsional arsiparis di Unit Pengolah dan di Unit Kearsipan.

km

h



- (2) Pejabat fungsional arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertugas melakukan pengamanan terhadap Arsip aktif yang ada di Unit Pengolah dan Arsip inaktif yang ada di Unit Kearsipan.
- (3) Dalam hal belum terdapat pejabat fungsional arsiparis di Unit Pengolah dan Unit Kearsipan, pejabat pimpinan tinggi pratama dapat menugaskan staf lain untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai pelaksana Arsip.


BAB VI
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada 8 Desember 2020

SEKRETARIS JENDERAL,


INDRA ISKANDAR
NIP. 19661114 199703 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NO. 14TAHUN 2020
TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FUNGSI SUBSTANTIF
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NO.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
I	LG.	LEGISLASI				
	LG. 01.	A RUU Inisiatif DPR RI				
	LG. 01.01.	1. Usulan RUU Inisiatif DPR RI				
		a. Surat Pengusul	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Sekretariat Komisi, Badan Musyawarah
		b. Naskah Akademis	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Sekretariat Komisi, Badan Musyawarah
		c. Draft RUU	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Sekretariat Komisi, Badan Musyawarah
		d. Harmonisasi usulan draft RUU	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Sekretariat Komisi, Badan Musyawarah
		e. Keputusan Badan Musyawarah (Bamus)	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Sekretariat Komisi, Badan Musyawarah



			f.	Keterangan dan penjelasan Pengusul	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Sekretariat Komisi, Badan Musyawarah
			g.	Masukan/Pendapat Fraksi-Fraksi	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Sekretariat Komisi, Badan Musyawarah
			h.	Risalah Rapat Paripurna	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Sekretariat Komisi, Badan Musyawarah
			i.	Surat Pengantar Ketua DPR RI kepada Presiden RI terkait draft RUU	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Sekretariat Komisi, Badan Musyawarah
			j.	Surat Presiden terkait dengan penunjukan Menteri yang mewakili Presiden	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Sekretariat Komisi, Badan Musyawarah
			k.	Keputusan DPR RI tentang pembahasan RUU	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Sekretariat Komisi, Badan Musyawarah
			l.	Rapat Dengar Pendapar (RDP)	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Sekretariat Komisi, Badan Musyawarah
			m.	Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Sekretariat Komisi, Badan Musyawarah
			n.	Keputusan DPR RI tentang Pembentukan Pansus (apabila pembahasan RUU diserahkan ke Pansus)	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Sekretariat Komisi, Badan Musyawarah
LG. 01.02.		2.	Pembahasan RUU Inisiatif DPR RI					



			a.	Berkas Persiapan Pembahasan RUU				
				- Mekanisme Pembahasan RUU	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Sekretariat Komisi
				- Jadwal Acara Rapat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Sekretariat Komisi
				- Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Sekretariat Komisi
			b.	Berkas Rapat Intern/Rapat Kerja/Rapat Panja				
				- Daftar hadir	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Sekretariat Komisi
				- Laporan singkat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Sekretariat Komisi
				- Risalah rapat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Sekretariat Komisi

				- Rekaman rapat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Sekretariat Komisi
			c.	Berkas Rapat Tim Perumus/Tim Sinkronisasi				
				- Daftar hadir	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Sekretariat Komisi
				- Laporan singkat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Sekretariat Komisi
				- Risalah rapat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Sekretariat Komisi
				- Rekaman rapat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Sekretariat Komisi
			d.	Berkas Kunjungan Kerja				
				- Surat Tugas, Bahan Kunjungan Kerja, Jadwal Acara	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Komisi
				- Laporan/Hasil Kunjungan Kerja/Bahan Masukan RUU	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Komisi
			e.	Bekas putusan pembahasan RUU inisiatif DPR RI				

				- Pengantar Pimpinan Komisi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Sekretariat Komisi
				- Laporan Panitia Kerja	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Sekretariat Komisi
				- Pendapat akhir fraksi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Sekretariat Komisi
				- Pandangan Pemerintah	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Sekretariat Komisi
				- Draft Akhir RUU	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Sekretariat Komisi
LG. 01.03.		3.	Pengesahan RUU Inisiatif DPR RI					
			a.	Permohonan Penjadwalan dan Persetujuan	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi, Sekretariat Badan Musyawarah
			b.	Keputusan Bamus	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi, Sekretariat Badan Musyawarah
			c.	Laporan Komisi/Badan/Panitia Khusus (Pansus)	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi, Sekretariat Badan Musyawarah

			d.	Pendapat Akhir Pemerintah	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi, Sekretariat Badan Musyawarah
			e.	Surat Ketua DPR RI kepada Presiden tentang keputusan RUU	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi, Sekretariat Badan Musyawarah
			f.	Keputusan DPR RI tentang RUU	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi, Sekretariat Badan Musyawarah
LG. 02.	B. RUU Usul Pemerintah							
LG. 02.01.	1. Usulan RUU Pemerintah							
			a.	Surat Pengantar Presiden terkait dengan Penyampaian RUU	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi, Sekretariat Badan Musyawarah
			b.	Naskah Akademik	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi, Sekretariat Badan Musyawarah
			c.	Draft RUU	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi, Sekretariat Badan Musyawarah
			d.	Harmonisasi usulan RUU	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi, Sekretariat Badan Musyawarah
			e.	Keputusan Bamus	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi, Sekretariat Badan Musyawarah

			f.	Keterangan/penjelasan Pengusul	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi, Sekretariat Badan Musyawarah
			g.	Pendapat Fraksi-fraksi	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi, Sekretariat Badan Musyawarah
			h.	Risalah Rapat Paripurna	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi, Sekretariat Badan Musyawarah
			i.	Surat Ketua DPR RI Pengantar RUU kepada Presiden RI	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi, Sekretariat Badan Musyawarah
			j.	Surat Presiden tentang Penunjukan Menteri Yang Mewakili Presiden	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi, Sekretariat Badan Musyawarah
			k.	Keputusan DPR RI tentang pembahasan RUU	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi, Sekretariat Badan Musyawarah
			l.	RDP	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi, Sekretariat Badan Musyawarah
			m.	RDPU	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi, Sekretariat Badan Musyawarah



			n.	Keputusan DPR RI tentang Pembentukan Pansus (apabila pembahasan RUU diserahkan ke Pansus)	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi, Sekretariat Badan Musyawarah
LG. 02.02.			2.	Pembahasan RUU Usul Pemerintah				
			a.	Berkas persiapan pembahasan RUU				
				- Mekanisme Pembahasan RUU	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Sekretariat Komisi
				- Jadwal acara rapat-rapat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Sekretariat Komisi
				- Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Sekretariat Komisi
			b.	Berkas rapat intern/Rapat Kerja/Rapat Panja				
				- Daftar hadir	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Sekretariat Komisi
				- Laporan singkat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Sekretariat Komisi
				- Risalah rapat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Sekretariat Komisi



				- Rekaman rapat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Sekretariat Komisi
			c.	Berkas Kunjungan Kerja				
				- Surat Tugas, bahan kunjungan kerja, Jadwal acara	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Komisi
				- Laporan/hasil kunjungan kerja	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Komisi
			d.	Berkas Rapat Tim Perumus/Tim Sinkronisasi				
				- Daftar hadir	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Sekretariat Komisi
				- Laporan singkat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Sekretariat Komisi
				- Risalah rapat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Sekretariat Komisi
				- Rekaman rapat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Sekretariat Komisi

			e.	Berkas Putusan Pembahasan RUU Inisiatif Pemerintah				
				- Pengantar Pimpinan Komisi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Sekretariat Komisi
				- Laporan Panitia Kerja	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Sekretariat Komisi
				- Pendapat akhir mini fraksi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Sekretariat Komisi
				- Pandangan Umum Pemerintah	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Sekretariat Komisi
				- Laporan Singkat Pengambilan Keputusan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Sekretariat Komisi
				- Draft Akhir RUU	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Sekretariat Komisi
LG. 02.03.		3		Pengesahan RUU Usul Pemerintah				
			a.	Permohonan Penjadwalan dan Persetujuan	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi, Sekretariat Badan Musyawarah

			b.	Keputusan Bamus	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi, Sekretariat Badan Musyawarah
			c.	Laporan Komisi/Badan/Pansus	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi, Sekretariat Badan Musyawarah
			d.	Pendapat Akhir Pemerintah	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi, Sekretariat Badan Musyawarah
			e.	Surat Penganatr Ketua DPR RI kepada Presiden tentang Persetujuan RUU	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi, Sekretariat Badan Musyawarah
			f.	Keputusan DPR RI tentang RUU	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi, Sekretariat Badan Musyawarah
LG. 03	C. RUU Usul DPD RI							
LG. 03.01.	1. Usulan RUU Usul DPD RI							
			a.	Surat Pengantar Pimpinan DPD RI terkait dengan penyampaian RUU	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi
			b.	Naskah Akademik	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi
			c.	Draft RUU	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi
			d.	Keterangan DPD	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi



			e.	Surat Pengantar RUU dari Pimpinan DPR RI kepada Presiden RI	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi	
			f.	Keputusan DPR RI Tentang Pembentukan Pansus	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi	
			g.	Surat Pimpinan DPR RI kepada Pimpinan DPD mengenai Penunjukan Alat Kelengkapan DPD	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi	
LG. 03.02.			2. Pembahasan RUU Usul DPD RI						
			a.	Berkas persiapan pembahasan RUU					
				- Mekanisme Pembahasan RUU	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi	
				- Daftar Jadwal Acara Rapat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi	
				- Daftar Inventaris Masalah (DIM)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi	
			b.	Berkas rapat intern/Rapat Kerja/Rapat Panja					
				- Daftar hadir	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi	
				- Laporan singkat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi	



				- Risalah rapat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi
				- Rekaman rapat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi
			c.	Berkas Rapat Tim Perumus/Tim Sinkronisasi				
				- Daftar hadir	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi
				- Laporan singkat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi
				- Risalah rapat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi
				- Rekaman rapat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi
			d.	Bekas Putusan Pembahasan RUU Usul DPD RI				
				- Pengantar Pimpinan Komisi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi, Set. Badan Musyawarah



				- Laporan Panitia Kerja	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi, Set. Badan Musyawarah
				- Pendapat akhir fraksi	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi, Set. Badan Musyawarah
				- Pandangan Umum Pemerintah	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi, Set. Badan Musyawarah
				- Draft Akhir RUU	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi, Set. Badan Musyawarah
				- Laporan Singkat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi, Set. Badan Musyawarah
				- Rekaman Rapat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi, Set. Badan Musyawarah
LG. 03.03.				3 Pengesahan RUU Usul DPD RI				
			a.	Permohonan Penjadwalan dan Persetujuan	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi, Set. Badan Musyawarah
			b.	Keputusan Bamus	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi, Set. Badan Musyawarah
			c.	Laporan Komisi/Badan/Pansus	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi, Set. Badan Musyawarah



			d.	Pendapat Akhir Pemerintah	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi, Set. Badan Musyawarah
			e.	Surat Pengantar Ketua DPR RI kepada Presiden tentang Persetujuan RUU	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi, Set. Badan Musyawarah
			f.	Keputusan DPR RI	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretariat Badan Legislasi, Set. Komisi, Set. Badan Musyawarah
II	AG.	ANGGARAN						
AG. 01	A.	RAPAT PENDAHULUAN RAPBN DAN RKP						
AG. 01.01.	1.	Berkas Rapat Pendahuluan RAPBN dan RKP						
			a.	Surat Presiden sebagai pengantar dan penugasan kepada Menteri yang akan membahas	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Set. Badan Anggaran, Sekretariat Komisi
			b.	Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Set. Badan Anggaran, Sekretariat Komisi
			c.	Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Set. Badan Anggaran, Sekretariat Komisi
			d.	Keterangan/pokok-pokok penjelasan Pemerintah	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Set. Badan Anggaran, Sekretariat Komisi
			e.	Pandangan umum Fraksi-fraksi	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Set. Badan Anggaran, Sekretariat Komisi
			f.	Jawaban Pemerintah	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Set. Badan Anggaran, Sekretariat Komisi



			g.	Penugasan pembahasan RAPBN oleh Badan Anggaran	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Set. Badan Anggaran, Sekretariat Komisi
			h.	Rekaman rapat	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Set. Badan Anggaran, Sekretariat Komisi
AG. 01.02.		2.	Pembahasan Bahan Rapat Pendahuluan RAPBN dan RKP					
			a.	Siklus dan Mekanisme Pembahasan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Set. Badan Anggaran
			b.	Risalah/putusan Rapat Intern	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Set. Badan Anggaran
			c.	Risalah/putusan Rapat Kerja	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Set. Badan Anggaran
			d.	Risalah/putusan Rapat Panja	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Set. Badan Anggaran
			e.	Risalah/putusan Rapat Tim Perumus	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Set. Badan Anggaran
			f.	Laporan Panja-panja	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Set. Badan Anggaran



			g.	Kesimpulan Rapat Kerja	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Set. Badan Anggaran
			h.	Rekaman rapat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Set. Badan Anggaran
AG. 01.03.		3.	Pengesahan Hasil Rapat Pendahuluan RAPBN dan RKP					
			a.	Laporan Badan Anggaran	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Set. Badan Anggaran
AG. 02.		B.	PEMBAHASAN LAPORAN SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II					
AG. 02.01.		1.	Usulan Laporan Semester I dan Prognosis Semester II		Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Set. Badan Anggaran
			a.	Penyiapan laporan semester I dan prognosis semester II	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Set. Badan Anggaran
			b.	Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Set. Badan Anggaran
AG. 02.02.		2.	Pembahasan Laporan Semester I dan Prognosis Semester II		Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Set. Badan Anggaran



			a.	Siklus dan Mekanisme Pembahasan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Set. Badan Anggaran
			b.	Rapat Intern	Rahasia	Pimpinan Tinggi Madya	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Set. Badan Anggaran
			c.	Rapat Kerja	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Set. Badan Anggaran
			d.	Rapat Panja	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Set. Badan Anggaran
			e.	Rekaman rapat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Set. Badan Anggaran
AG. 02.03.			3.	Pengesahan Laporan Semester I dan Prognosis Semester II	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Set. Badan Anggaran
			a.	Laporan Panitia Kerja	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Set. Badan Anggaran



			b.	Kesimpulan Rapat Kerja	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Set. Badan Anggaran
AG. 03.	C. PEMBAHASAN RUU TENTANG PERUBAHAN APBN							
AG. 03.01.	1. Usulan RUU tentang Perubahan APBN							
			a.	Surat Presiden RI sebagai Pengantar Naskah RUU	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Set. Badan Anggaran
			b.	Draf awal RUU dan Nota Keuangan Perubahan	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Set. Badan Anggaran
			c.	Penugasan Pembahasan kepada Badan Anggaran	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Set. Badan Anggaran
AG. 03.02.	2. Pembahasan RUU tentang Perubahan APBN							
			a.	Siklus dan Mekanisme Pembahasan	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Set. Badan Anggaran
			b.	Rapat Intern	Rahasia	Pimpinan Tinggi Madya	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak komitmen	Set. Badan Anggaran
			c.	Rapat Kerja	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Set. Badan Anggaran
			d.	Rapat Panja	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Set. Badan Anggaran



			e.	Rapat Tim Perumus	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Set. Badan Anggaran
			f.	Pertimbangan DPD RI terhadap RUU tentang Perubahan APBN	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Set. Badan Anggaran
			g.	Laporan Panitia Kerja	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Set. Badan Anggaran
			h.	Pendapat Mini sikap akhir Fraksi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Set. Badan Anggaran
			i.	Kesimpulan Rapat Kerja	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Set. Badan Anggaran
			j.	Draft RUU Persetujuan Fraksi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Set. Badan Anggaran
			k.	Rekaman rapat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Set. Badan Anggaran
AG. 03.03.		3.	Pengesahan RUU tentang Perubahan APBN					
			a.	Laporan Badan Anggaran	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Set. Badan Anggaran



			b.	Pendapat Akhir Pemerintah	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Set. Badan Anggaran
			c.	Surat Pengantar Persetujuan Ketua DPR RI	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Set. Badan Anggaran
			d.	Surat Keputusan Ketua DPR RI	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Set. Badan Anggaran
			e.	Draf RUU Persetujuan Pimpinan DPR RI	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Set. Badan Anggaran
AG. 04.		D.		PEMBAHASAN RUU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN APBN (P2APBN)				
AG. 04.01.		1.		Usulan RUU tentang P2APBN				
			a.	Surat Presiden RI sebagai Pengantar Naskah RUU	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Set. Badan Anggaran
			b.	Draf Awal RUU dan LKPP	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Set. Badan Anggaran
			c.	Keterangan Pemerintah	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Set. Badan Anggaran
			d.	Pandangan Umum Fraksi	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Set. Badan Anggaran
			e.	Jawaban Pemerintah	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Set. Badan Anggaran
			f.	Penugasan Pembahasan kepada Badan Anggaran	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Set. Badan Anggaran



AG. 04.02.		2.	Pembahasan RUU tentang P2APBN				
		a.	Siklus dan Mekanisme Pembahasan	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Set. Badan Anggaran
		b.	Rapat Intern	Rahasia	Pimpinan Tinggi Madya	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan	Set. Badan Anggaran
		c.	Rapat Kerja	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Set. Badan Anggaran
		d.	Rapat Panja	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Set. Badan Anggaran
		e.	Rapat Tim Perumus	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Set. Badan Anggaran
		f.	Pertimbangan DPD RI terhadap RUU tentang P2APBN	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Set. Badan Anggaran
		g.	Laporan Panitia Kerja	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Set. Badan Anggaran
		h.	Kesimpulan Rapat Kerja	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Set. Badan Anggaran



			i.	Draf RUU Persetujuan Fraksi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Set. Badan Anggaran	
			j.	Rekaman rapat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Set. Badan Anggaran	
AG. 04.03.		3.	Pengesahan RUU tentang P2APBN						
			a.	Laporan Badan Anggaran	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Set. Badan Anggaran	
			b.	Pendapat akhir Pemerintah	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Set. Badan Anggaran	
			c.	Surat Ketua DPR RI tentang Pengantar Persetujuan	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Set. Badan Anggaran	
			d.	Surat Keputusan Ketua DPR RI	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Set. Badan Anggaran	
			e.	Draf RUU Persetujuan Pimpinan DPR RI	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Set. Badan Anggaran	
AG. 05.		E.	PEMBAHASAN RUU TENTANG APBN BESERTA NOTA KEUANGAN						
AG. 05.01.		1.	Usulan RUU tentang APBN dan Nota Keuangan						
			a.	Surat Presiden RI sebagai Pengantar Naskah RUU	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Set. Badan Anggaran	



			b.	Draf Awal RUU dan Nota Keuangan	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Set. Badan Anggaran
			c.	Pidato Presiden	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Set. Badan Anggaran
			d.	Keterangan Pemerintah	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Set. Badan Anggaran
			e.	Pandangan Umum Fraksi	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Set. Badan Anggaran
			f.	Jawaban Pemerintah	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Set. Badan Anggaran
			g.	Penugasan Pembahasan kepada Badan Anggaran	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Set. Badan Anggaran
AG. 05.02.			2.	Pembahasan RUU tentang APBN				
			a.	Siklus dan Mekanisme Pembahasan	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Set. Badan Anggaran
			b.	Rapat Intern	Rahasia	Pimpinan Tinggi Madya	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Set. Badan Anggaran



			c.	Rapat Kerja	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Set. Badan Anggaran
			d.	Rapat Panja	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Set. Badan Anggaran
			e.	Rapat Tim Perumus	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Set. Badan Anggaran
			f.	Pertimbangan DPD RI terhadap RUU tentang P2APBN	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Set. Badan Anggaran
			g.	Laporan Panitia Kerja	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Set. Badan Anggaran
			h.	Kesimpulan Rapat Kerja	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Set. Badan Anggaran
			i.	Draf RUU yang ditandatangani Fraksi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Set. Badan Anggaran
			j.	Rekaman rapat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Set. Badan Anggaran
AG. 05.03.		3.	Pengesahan RUU tentang APBN					



		a.	Laporan Badan Anggaran	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Set. Badan Anggaran
		b.	Pendapat Akhir Pemerintah	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Set. Badan Anggaran
		c.	Surat Ketua DPR RI tentang Pengantar Persetujuan	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Set. Badan Anggaran
		d.	Surat Keputusan Ketua DPR RI	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Set. Badan Anggaran
		e.	Draf RUU Persetujuan Pimpinan DPR RI	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Set. Badan Anggaran
AG. 06.		F.	PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN ANGGARAN				
AG. 06.01.	1.		Rapat Intern/Koordinasi/Konsultasi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Set. Badan Anggaran
AG. 06.02.	2.		Penerimaan Tamu/Audiensi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Set. Badan Anggaran
AG. 06.03.	3.		RDP/RDPU/Pandangan Pakar	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Set. Badan Anggaran
AG. 06.04.	4.		Kompilasi Pembahasan APBN	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Set. Badan Anggaran



	AG. 06.05.		5. Rapat Kerja Dalam Negeri	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Set. Badan Anggaran	
	AG. 06.06.		6. Kunjungan Kerja Luar Negeri	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Set. Badan Anggaran	
III	PW.	PENGAWASAN						
	PW. 01.	A.	Pengawasan terhadap Pelaksanaan Undang-Undang					
			1. Berkas Rapat Internal	Rahasia	Pimpinan Tinggi Madya	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta menusak kemitraan	AKD	
			2. Berkas Rapat Kerja	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	AKD	
			3. Berkas Rapat Dengar Pendapat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	AKD	
			4. Berkas Rapat Dengar Pendapat Umum	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	AKD	
			5. Berkas Audiensi	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	AKD	
			6. Berkas Kunjungan Kerja					
			- Kunjungan Kerja Dalam Negeri	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	AKD	



			- Kunjungan Kerja Luar Negeri	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	AKD
			- Kunjungan Spesifik	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	AKD
PW. 02.	B. Fit and Propertest						
		1.	Berkas Fit and Propertest	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	AKD
		2.	Proses Pengujian/seleksi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	AKD
		3.	Hasil /Rekomendasi Fit and Propertest	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	AKD
		4.	Penyampaian hasil/rekomendasi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	AKD
		5.	Rekaman Rapat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	AKD
PW. 03.	C. Panitia Khusus (Non RUU)						
		1.	Berkas Rapat Intern/Pansus	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	AKD



		2. Berkas Rapat Kerja	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	AKD
		3. Berkas Rapat Dengar Pendapat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	AKD
		4. Berkas Rapat Dengar Pendapat Umum	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	AKD
		5. Berkas Kunjungan Kerja	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	AKD
		6. Rekaman Rapat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	AKD
PW. 04.	D. Pengawasan Oleh Panitia Kerja					
		1. Berkas Rapat Kerja	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	AKD
		2. Berkas Rapat Dengar Pendapat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	AKD
		3. Berkas Rapat Dengar Pendapat Umum	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	AKD
		4. Rekaman Rapat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	AKD
PW. 05.	E. Hak Angket					
PW. 05.01.	1. Bagian Kesatu					



			a.	Surat Pengusul dan Tanda tangan Pengusul	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	AKD
			b.	Keterangan Pengusul	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	AKD
			c.	Pandangan Umum Fraksi-fraksi	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	AKD
			d.	Risalah Rapat Paripurna	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	AKD
			e.	Keputusan DPR-RI tentang Persetujuan Hak Angket	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	AKD
			f.	Surat Pimpinan DPR-RI kepada Presiden dan diumumkan dalam Berita Negara	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	AKD
			g.	Keputusan DPR RI tentang Pembentukan Panitia Angket	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	AKD
			h.	Pengumuman Hak Angket dalam Berita Negara	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	AKD
PW. 05.02.			2. Bagian Kedua					
			a.	Rapat Panitia Kerja (Intern)	Rahasia	Pimpinan Tinggi Madya	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	AKD



			b.	Rapat Kerja	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	AKD
			c.	Rapat Dengar Pendapat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	AKD
			d.	Rapat Dengar Pendapat Umum	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	AKD
			e.	Rekaman rapat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	AKD
PW. 05.03.			3. Bagian Ketiga					
			a.	Laporan Panitia Angket	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	AKD
			b.	Pendapat Akhir Fraksi-fraksi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	AKD
			c.	Rekomendasi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	AKD
			d.	Keputusan DPR-RI mengenai Hak Angket	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	AKD



			e. Surat Pengantar ke Presiden	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	AKD
PW. 06.	F. Hak Interpelasi						
		1.	Surat Pengusul dan Tanda tangan Pengusul	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	AKD
		2.	Keterangan Pengusul	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	AKD
		3.	Keputusan DPR-RI tentang Persetujuan Hak Interpelasi	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	AKD
		4.	Risalah Rapat Paripurna	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	AKD
		5.	Surat Pimpinan DPR-RI kepada Presiden mengenai Undangan kepada Presiden untuk memberikan Keterangan	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	AKD
		6.	Keterangan Presiden atas materi Interpelasi	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	AKD
		7.	Tanggapan Pengusul/Anggota atas Keterangan Presiden	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	AKD
		8.	Jawaban Presiden atas Tanggapan Pengusul/Anggota	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	AKD
PW. 07.	G. Hak Menyatakan Pendapat						
PW. 07.01.	1. Bagian Kesatu						



			a.	Surat Pengusul dan Tanda tangan Pengusul	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	AKD
			b.	Keterangan Pengusul	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	AKD
			c.	Pandangan Umum Fraksi-fraksi	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	AKD
			d.	Risalah Rapat Paripurna	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	AKD
			e.	Keputusan DPR RI tentang Pembentukan Panitia Khusus Hak Menyatakan Pendapat	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	AKD
			f.	Pembentukan Panitia Khusus Hak Menyatakan Pendapat	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	AKD
	PW. 07.02.		2. Bagian Kedua					
			a.	Rapat Panitia Kerja (Intern)	Rahasia	Pimpinan Tinggi Madya	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	AKD
			b.	Rapat Kerja	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	AKD



			c.	Rapat Dengar Pendapat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	AKD
			d.	Rapat Dengar Pendapat Umum	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	AKD
			e.	Rekaman rapat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	AKD
PW. 07.03.			3. Bagian Ketiga					
			a.	Laporan Panitia Hak Menyatakan Pendapat pada Rapat Paripurna	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	AKD
			b.	Pendapat Akhir Farksi-f aksi	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	AKD
			c.	Rekomendasi Pansus	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	AKD
			d.	Keputusan DPR-RI mengenai Hak Menyatakan Pendapat	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	AKD
			e.	Surat Pengantar DPR RI ke Mahkamah Konstitusi	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	AKD
			f.	Surat Pengantar DPR RI ke Presiden	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	AKD
PW. 08.			H. Telaah Hasil Pemeriksaan BPK					



			1. Telaahan hasil pemeriksaan BPK	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretraiat BAKN, Inspektorat Utama
			2. Penyampaian hasil telaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK ke Komisi	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretraiat BAKN, Inspektorat Utama
			3. Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Sekretraiat BAKN, Inspektorat Utama
			4. Masukan kepada BPK RI	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretraiat BAKN, Inspektorat Utama
			5. Laporan Kegiatan BAKN kepada Pimpinan DPR RI pada Rapat Paripurna	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Sekretraiat BAKN, Inspektorat Utama
PW. 09.	I.		Pengaduan Masyarakat Kepada Mahkamah Kehormatan Dewan	Rahasia	Pimpinan Tinggi Madya	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	SET. MKD
			1. Berkas pengaduan masyarakat				
			2. Analisa berkas pengaduan masyarakat				
			3. Proses Tindak Lanjut hasil analisa kasus pengaduan				
			4. Penanganan kasus/perkara oleh Mahkamah Kehormatan Dewan				
			a. Korespondensi/Administrasi Penanganan Perkara Mahkamah Kehormatan				
			b. Rapat Internal MKD				
			c. Rekomendasi/Putusan penyelesaian kasus				



PW. 10	J.	Pemberian Bantuan Hukum dan pemantauan, Analisis dan Evaluasi Terhadap pelaksanaan Undang-Undang		Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	PUU
		1.	Rapat Koordinasi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	PUU
		2.	Penyusunan Analisis/Kajian Terhadap Perkara/Kasus Hukum	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	PUU
		3.	Penyusunan keterangan tertulis DPR RI dalam rangka uji materi Undang-undang di MK	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	PUU
		4.	Penyusunan Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	PUU
		5.	Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	PUU
PW. 11.	K.	Persidangan dan Kerjasama Antar Parlemen					
PW. 11.01.		1. Berkas Persidangan					
		a.	Rapat Paripurna	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	SET. BKSAP
		b.	Rapat Pimpinan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	SET. BKSAP



			c.	Rapat Konsultasi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	SET. BKSAP
			d.	Rapat Koordinasi Bidang	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	SET. BKSAP
			e.	Rekaman rapat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	SET. BKSAP
PW. 11.02.			2. Kerjasama Antar Parlemen					
			a.	Berkas Kerjasama Organisasi International (KSI), Kerjasama Regional (KSR), Kerjasama Bilateral (KSB)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	SET. BKSAP
				- Naskah Kerjasama (MoU, PKS)				
				- Berkas pelaksanaan kerjasama				
			b.	Analisis terhadap Isu-Isu Internasional, Regional dan Bilateral	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	SET. BKSAP

SEKRETARIS JENDERAL,


INDRA ISKANDAR
 NIP. 196611141997031001

LAMPIRAN II
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NO.14 TAHUN 2020
TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FUNGSI FASILITATIF
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NO.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
I.	PR.	PERENCANAAN				
	PR. 01	A. Perencanaan Strategis dan Program				
	PR. 01.01	1. Rencana strategis (Renstra)	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Perencanaan
	PR. 01.02	2. Rencanan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Perencanaan
	PR. 01.03	3. Rencanan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Perencanaan
	PR. 01.04	4. Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Perencanaan
	PR. 02	B. Program Kerja Tahunan				
	PR. 02.01	1. Usulan perencanaan kegiatan unit kerja	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Perencanaan
	PR. 02.02	2. Program kerja tahunan unit kerja	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Perencanaan
	PR. 02.03	3. Program kerja tahunan Setjen DPR RI	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Perencanaan
	PR. 02.04	4. Rencana kerja berdasar pagu indikatif	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Perencanaan
	PR. 03	C. Penyusunan RAPBN				

PR. 03.01		1.	Ketetapan pagu indikatif, pagu sementara, pagu definitif	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Perencanaan
PR. 03.02		2.	Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL)	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Perencanaan
PR. 03.03		3.	Daftar Isian dan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Revisi	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Perencanaan
PR. 03.04		4.	Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRA)	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Perencanaan
PR. 04		D. Penetapan/Kontrak Kinerja					
PR. 04.01		1.	Ketua Lembaga/Sekjen DPR RI	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Perencanaan
PR. 04.02		2.	Pimpinan Unit Kerja	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Perencanaan
PR. 05		E. Laporan					
PR. 05.01		1.	Laporan khusus	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Perencanaan
PR. 05.02		2.	Laporan Berkala	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Perencanaan
			- Laporan Bulanan Unit Kerja				
			- Laporan Triwulan Unit Kerja				
			- Laporan Semesteran Unit Kerja				
			- Laporan Tahunan Unit Kerja				
PR. 05.03		3.	Laporan Tahunan DPR RI (Setjen dan Dewan)	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Perencanaan
PR. 05.04		4.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Perencanaan
			a. LAKIP Unit Kerja				
			b. LAKIP DPR RI (Setjen dan Dewan)				
PR. 06		F. Evaluasi Program					
PR. 06.01		1.	Evaluasi Program Unit Kerja	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Perencanaan
PR. 06.02		2.	Evaluasi Program DPR RI	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Perencanaan
PR. 07		G. Monitoring dan Evaluasi Program					

	PR. 07.01		1. Anggaran Unit Kerja	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Perencanaan
	PR. 07.02		2. Anggaran DPR RI	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Perencanaan
	PR. 08	H.	Kerjasama	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Perencanaan
II.	KD.	KEANGGOTAAN DEWAN					
	KD. 01	A.	Pengangkatan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Minangwan
	KD. 02	B.	Mutasi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Minangwan
	KD. 03	C.	Kesejahteraan Anggota DPR RI				
	KD. 03.01		- Kesehatan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Minangwan
	KD. 03.02		- Tanda Kehormatan/Penghargaan	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Minangwan
	KD. 03.03		- Kebutuhan Pokok	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Minangwan
	KD. 04	D.	Pemberhentian	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Minangwan
	KD. 05	E.	Perizinan/Dispensasi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Minangwan
	KD. 06	F.	Berkas Perseorangan Pimpinan/Anggota Dewan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Minangwan
III.	KP.	KEPEGAWAIAN					
	KP. 01	A.	Perencanaan Pegawai	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Kepegawaian
	KP. 01.01		Bezzeting/Persediaan Pegawai				
			- Data Pegawai hasil peneklasifikasian				
			- Kajian data pegawai				
			- Konsen data bezzeting				

			- Evaluasi proses penyusunan data bezzeting				
			- Hasil dan laporan data bezzeting				
KP. 02		B. Formasi Pegawai					
KP. 02.01		1. Usulan kebutuhan pegawai dari Unit Kerja					
		- Analisis Jabatan		Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Kepegawaian
		- Beban Kerja		Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Kepegawaian
KP. 02.02		2. Usulan Permintaan Formasi kepada MenPAN dan RB dan Kepala B		Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Kepegawaian
KP. 02.03		3. Persetujuan Formasi dari Menpan RB dan Kepala BKN		Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Kepegawaian
		4. Penetapan Formasi PNS		Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Kepegawaian
KP. 02.04		5. Penetapan Formasi Khusus		Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Kepegawaian
KP. 03		C. Pengadaan Pegawai					
KP. 03.01		1. Proses Penerimaan Pegawai meliputi :		Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Kepegawaian
		- Pengumuman					
		- Seleksi administrasi					
		- Pemanggilan peserta tes					
		- Pelaksanaan ujian tertulis					
		- Keputusan hasil ujian tertulis					
		- Pelaksanaan ujian kesehatan					
		- Pelaksanaan tes kemampuan bidang					
		- Wawancara					
		- Keputusan kelulusan					
		- Pengumuman kelulusan					
KP. 03.01		2. Penetapan Pengumuman Kelulusan		Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Kepegawaian
KP. 03.01		3. Berkas Lamaran yang Tidak Diterima		Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Kepegawaian

KP. 03.01		4.	Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Kepegawaian
			- Surat lamaran				
			- Ijazah				
			- SKCK				
			- Kartu Kuning				
			- Surat keterangan kesehatan				
KP. 03.02		5.	Nota Usul Pengangkatan CPNS menjadi PNS Lebih 2 Tahun	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Kepegawaian
KP. 03.02		6.	Surat Keputusan CPNS/ PNS Kolektif	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Kepegawaian
KP. 04	D. Pembinaan Karir Pegawai						
KP. 04.01		1.	Diklat/Kursus/Magang/Ujian Dinas/Izin Belajar Pegawai/Ujian Penyesuaian Ijazah	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Kepegawaian
			- Surat Perintah/ Surat Tugas/SK/Surat Izin				
			- Laporan Kegiatan Pengembangan Diri				
KP. 04.01		2.	Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL)/Sertifikat	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Kepegawaian
KP. 04.02		3.	Ujian Kompetensi	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Kepegawaian
			- Assesment Test Pegawai				
			- Pemetaan/Mapping talent pegawai				
KP. 04.04		4.	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi PNS	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Kepegawaian
KP. 04.05		5.	Fakta Integritas Pegawai	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Kepegawaian
KP. 04.06		6.	Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Kepegawaian
KP. 04.07		7.	Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Kepegawaian
KP. 04.08		8.	Disiplin Pegawai	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Kepegawaian
			- Daftar Hadir				
			- Rekapitulasi Daftar Hadir				

		9.	Berkas Hukuman Disiplin	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Kepegawaian
KP. 04.09		10.	Penghargaan dan Tanda Jasa	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Kepegawaian
KP. 04.10		11.	Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Kepegawaian
KP. 05	E. Mutasi Pegawai						
KP. 05.01		1.	Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Mutasi Antar Unit Kerja	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Kepegawaian
		2.	Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN dan Setjen DPR RI	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Kepegawaian
		3.	Berita Acara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Kepegawaian
		4.	Mutasi Keluarga	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Kepegawaian
			- Surat Izin Pernikahan /Perceraian				
			- Surat Penolakan Izin Pernikahan /Perceraian				
			- Akta Nikah /Cerai				
			- Akta Kelahiran Anak				
			- Surat Keterangan Meninggal Dunia				
		5.	Usul Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan Struktural dan Fungsional	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Kepegawaian
KP. 05.02		6.	Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/Fungsional	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Kepegawaian
KP. 05.03		7.	Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Kepegawaian
		8.	Peninjauan Masa Kerja	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Kepegawaian
KP. 05.04		9.	Berkas Baperjakat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Kepegawaian

KP. 06	F. Administrasi Pegawai						
		1.	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Kepegawaian
		2.	Cuti Besar	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Kepegawaian
		3.	Cuti Sakit, Cuti Tahunan, Cuti Bersalin	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Kepegawaian
		4.	Cuti Alasan Penting	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Kepegawaian
		5.	Cuti Diluar Tanggungan Negara (CTLN)	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Kepegawaian
KP. 06.01		6.	Dokumentasi Identitas Pegawai	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Kepegawaian
KP. 06.02			- Usul Penetapan Kartu Pegawai/KPE/Karis/Karsu				
KP. 06.03			- Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan				
KP. 06.04			- Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)/ SPT Tahunan/				
KP. 06.05			- Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)				
KP. 06.06		7.	Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Kepegawaian
KP. 06.07		8.	Berkas Pengurusan Gaji Berkala	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Kepegawaian
KP. 06.08		9.	Berkas Tunjangan Kinerja dan Uang Makan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Kepegawaian
KP. 08	G. Kesejahteraan						
KP. 08.01		1.	Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Kepegawaian

KP. 08.02		2.	Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Kepegawaian
KP. 08.03		3.	Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Kepegawaian
KP. 08.04		4.	Berkas tentang Layanan Tabungan Pensiun	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Kepegawaian
KP. 08.05		5.	Pemberian <i>extrafooding</i>	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Kepegawaian
KP. 09		H. Pemberhentian					
		1.	Pemberhentian Pegawai Tanpa Hak Pensiun	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Kepegawaian
KP. 09.03		2.	Perselisihan /Sengketa Kepegawaian	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Kepegawaian
KP. 09.04		3.	Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai/Janda/Duda dan PNS yang Tewas	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Kepegawaian
KP. 10		I.	Organisasi Non Kedinasan, meliputi: Korpri, Dharma Wanita, Koperasi	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Kepegawaian
KP. 11		J.	Berkas Perseorangan Pegawai Negeri Sipil :	Rahasia	Pimpinan Tinggi Madya	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Bagian Kepegawaian
		a.	Lamaran Yang Diterima				
		b.	Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya				
		c.	Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN				
		d.	SK Pengangkatan CPNS				
		e.	Hasil Pengujian Kesehatan				
		f.	SK Pengangkatan PNS				

		g.	SK Penilaian Masa Kerja			
		h.	SK Kenaikkan Pangkat			
		i.	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan			
		j.	SK Pengangkatan dalam atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional			
		k.	Berita Acara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan			
		l.	SK Perpindahan Wilayah Kerja			
		m.	SK Perpindahan Antar Instansi			
		n.	SK Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)			
		o.	Berita Acara Pemeriksaan			
		p.	SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS			
		q.	SK Perbantuan/Dipekerjakan/ Penugasan di luar Instansi Induk			
		r.	SK Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan/			
		s.	SK Pemberian Uang Tunggu			
		t.	SK Pemberhentian sebagai PNS			
		u.	SK Pemberhentian/ Pembebasan Sementara			
		v.	SK Pengangkatan/ Pemberhentian sebagai Pejabat Negara			
		w.	SK Pembebasan dari Jabatan Organik karena Diangkat Sebagai Pejabat Negara			
		x.	SK Pengalihan PNS			
		y.	Surat Keterangan Pernyataan Hilang			
		z.	Surat Keterangan Kembali PNS yang dinyatakan hilang aa.			
		aa.	SK Penggantian Nama			
		ab.	Surat perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran ac. Akta Nikah/Cerai			
		ac.	Akta Kelahiran			
		ad.	Isian Formulir PUPNS			
		ae.	Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Jabatan			
		af.	Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol			
		ag.	Surat Keterangan Meninggal Dunia/ Hilang			
		ah.	Surat Keterangan Mutasi Keluarga			
		ai.	Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan			
		aj.	Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional			
		ak.	Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus			
		al.	Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala an. Surat Tugas/ Izin Belajar Dalam/ Luar Negeri			
		am.	Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri			
		an.	Surat Persetujuan dan SK perubahan data dasar/ status/ kedudukan hukum kepegawaian			
		ao.	Kartu Pendaftaran Ulang (Kardaf) PNS			
		ap.	Ijazah/Sertifikat			
		aq.	SK Penempatan/Penarikan Pegawai			
		ar.	SK Pengangkatan pada Jabatan Kedinasan di Iuar Instansi Induk			
		as.	Surat Pertimbangan Status PNS			
		at.	SK Pengaktifan Kembali Sebagai PNS			

KP. 11.01	K.	Berkas Perseorangan Sekjen DPR RI	Rahasia	Pimpinan Tinggi Madya	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Bagian Kepegawaian
KP. 12	L.	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (NON ASN)	Rahasia	Pimpinan Tinggi Madya	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Bagian Kepegawaian
KP. 12.01		1. Berkas Tenaga Ahli				
KP. 12.02		2. Berkas Asisten Anggota				
KP. 12.03		3. Berkas Pegawai Tidak Tetap				
IV. DL.		PENDIDIKAN DAN LATIHAN				
DL. 01	A.	Perencanaan Diklat				
DL. 01.01		1. Perencanaan Diklat	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	PUSDIKLAT
DL. 01.02		2. Kurikulum/Silabus	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	PUSDIKLAT
DL. 01.03		3. Modul Bahan Ajar	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	PUSDIKLAT
DL. 01.04		4. Magang (PKL, Penelitian)	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	PUSDIKLAT
DL. 02	B.	Pelaksanaan Diklat				
DL. 02.01		1. Penyelenggaraan Diklat	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	PUSDIKLAT
		- Surat Pemanggilan				
		- Keputusan Penyelenggaraan diklat				
		- Surat Keputusan Tim Pengajar				
		- Laporan Penyelenggaraan Diklat				
		- Sambutan Pembukaan				
		- Daftar Peserta Diklat				
		- Materi Diklat				
		- Daftar Hadir Peserta				
		- Daftar Hadir Widvaisywara				
		- Formulir Evaluasi Diklat				
		- Formulir Evaluasi Widvaisywara				

			- Laporan Praktek Kerja Lapangan Peserta - Sambutan Penutupan - Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Diklat				
DL. 02.02		2.	Pelaksanaan Pendidikan Formal	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	PUSDIKLAT
			- SK Penunjukan /Ijin Atasan Unit kerja - Hasil Tes - Ijazah Kelulusan				
DL. 03		C.	Evaluasi Penyelenggaraan Diklat dan Pendidikan Formal	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	PUSDIKLAT
DL. 04		D.	Registrasi Sertifikat/STTPL/Buku Induk	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	PUSDIKLAT
V.	HK.	HUKUM					
HK. 01		A.	Rancangan Peraturan Perundangan tentang DPR RI				
HK. 01.01		1.	Rancangan UU dan/ Perppu dari rancangan awal sampai akhir, telaah hukum sampai diundangkan.	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Hukum
HK. 01.02		2.	Rancangan Peraturan Pemerintah dari rancangan awal sampai akhir, telaah hukum sampai diundangkan.	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Hukum
HK. 01.03		3.	Rancangan Peraturan/Keputusan/Instruksi Presiden dari rancangan awal sampai akhir, telaah hukum sampai diundangkan.	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Hukum
HK. 02		B.	Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran mulai dari Rancangan awal, telaah hukum, rancangan akhir hingga pengesahannya	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Hukum
HK. 02.01		1.	Peraturan DPR RI / Sekjen DPR RI				
HK. 02.02		2.	Keputusan DPR RI / Pimpinan DPR RI / Sekjen DPR RI				
HK. 02.03		3.	Instruksi Pimpinan DPR RI / Sekjen DPR RI				
HK. 02.04		4.	Surat Edaran Sekjen DPR RI				
HK. 03		C.	Nota Kesepahaman/Memorandum of Understandi (MoU)/Perjanjian Kerjasama/Perjanjian Pemanfaatan BMN	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Hukum

	HK. 04	D. Bantuan Hukum					
	HK. 04.01		1. Perdata	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Hukum
	HK. 04.02		2. Tata Usaha Negara	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Hukum
	HK. 04.03		3. Jenis Perkara lainnya	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Hukum
	HK. 04.04.		4. Non Litigasi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Hukum
	HK. 05.	Pertimbangan Hukum (Telaah/opini/kajian/analisis/pendapat hukum)		Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Hukum
	HK. 06	E. Kekayaan Intelektual					
	HK. 06.01		1. Hak Cipta	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Hukum
	HK. 06.02		2. Hak Paten	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Hukum
	HK. 07	F. Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan		Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Hukum
	HK. 07.01		1 Undang-undang/Perpu				
	HK. 07.02		2 Peraturan Pemerintah				
	HK. 07.03		3 Peraturan Presiden				
	HK. 07.04		4 Keputusan Presiden				
	HK. 07.05		5 Instruksi Presiden				
	HK. 08.	Analisa Pengaduan Masyarakat		Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Hukum
VI.	KS.	KERJASAMA					

KS. 01	Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU)/ Kontrak/ Perjanjian Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	BKSAP
KS. 01.01	A. Kerjasama Organisasi Internasional				
	1. Organisasi Profesi				
	2. Organisasi Pemerintah				
	3. Organisasi Swasta				
KS. 01.02	B. Kerjasama Organisasi Dalam Negeri				
	1. Organisasi Profesi				
	2. Organisasi Pemerintah				
	3. Organisasi Swasta				
KS. 01.03	C. Kerjasama Organisasi Antar Instansi/Lembaga				
	1. Organisasi Profesi				
	2. Organisasi Pemerintah				
	3. Organisasi Swasta				
VII. OT.	ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN				
OT. 01	A. Penataan Organisasi	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Ortala
OT. 02	B. Evaluasi Kelembagaan	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Ortala
OT. 03	C. Ketatalaksanaan				
OT. 03.01	1. Peta Proses Bisnis	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Ortala
OT. 03.02	2. Standar Pelayanan	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Ortala
OT. 03.03	3. SOP/ Prosedur Tetap	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Ortala
OT. 03.04	4. Mekanisme Kerja/ Tata Hubungan Kerja	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Ortala
OT. 04	D. Penataan Jabatan				
OT. 04.01	1. Analisa jabatan	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Ortala
OT. 04.02	2. Standar kompetensi jabatan	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Ortala

	OT. 04.03		3. Analisa Beban Kerja	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Ortala
	OT. 04.04		4. Evaluasi Jabatan	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Ortala
	OT. 04.05		5. Pembentukan Jabatan Fungsional	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Ortala
	OT. 05		D. Implementasi Reformasi Birokrasi				
	OT. 05.01		1. Reformasi Birokrasi	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Ortala
	OT. 05.02		2. tasi reformasi birokrasi	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Ortala
VIII.	HM.		HUBUNGAN MASYARAKAT				
	HM. 01		A. Media Massa	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Pemberitaan
	HM. 01.01		1. Liputan				
			2. Wawancara				
	HM. 01.02		3. Penyajian konten media sosial				
	HM. 01.03		4. Pertemuan media massa				
	HM. 01.04		5. Dokumentasi (foto, gambar, video dan buku)				
	HM. 01.05		6. Forum kehumasan				
	HM. 02		B. Produksi Komunikasi	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Metaksos
			1. Pembuatan film atau video				
			2. Advertorial cetak dan online				
			3. Publikasi (buletin, majalah, buku)				
			4. Penyajian berita				
	HM. 03		C. Penerangan	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Humas
	HM. 03.01		1. Tamu Edukasi				
	HM. 03.02		2. Parlemen Kampus				
	HM. 03.03		3. Parlemen Remaja				
	HM. 03.04		4. Pameran				
	HM. 03.05		5. Seminar Bakohumas				
	HM. 04		D. Pelayanan Informasi Publik	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Humas
			1. Permohonan Data/Informasi				
			2. Pengajuan Keberatan dan Sengketa				
			3. Survey Kepuasan Masyarakat (Periodik)				
			4. Laporan tahunan layanan informasi publik				

IX.	PT.	KEPROTOKOLAN					
	PT. 01	A. Pidato					
	PT. 01.01	1.	Pidato Kenegaraan	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Protokol
	PT. 01.02	2.	Pidato Pembukaan/Penutupan Masa Sidang	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Protokol
	PT. 02	B. Pelantikan/Pengukuhan		Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Protokol
	PT. 02.01	1.	Pimpinan/Anggota Dewan				
			- Undangan				
			- Daftar petugas				
			- Daftar hadir				
			- Naskah pidato				
			- Dokumentasi				
	PT. 02.02	2.	Pegawai				
			- Undangan				
			- Daftar petugas				
			- Daftar hadir				
			- Naskah pidato/Sambutan				
			- Dokumentasi				
	PT. 03	C. Peresmian		Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Protokol
			- Undangan				
			- Daftar petugas				
			- Daftar hadir				
			- Naskah pidato/Sambutan				
			- Dokumentasi				
	PT. 04	D. Upacara					
	PT. 04.01	a.	Upacara Bendera (Undangan, Daftar petugas, Daftar hadir, Naskah pidato/sambutan)	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Protokol
	PT. 04.02	b.	Upacara Persemayaman jenazah Pimpinan dan Anggota DPR RI (Pemberitahuan/pengumuman, Daftar petugas, Naskah pidato/sambutan, dokumentasi)	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Protokol
	PT. 05	E. Penerimaan Tamu/Jamuan Pimpinan					
		1.	Agenda Kegiatan Pimpinan	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Protokol
		2.	Tamu dalam dan luar negeri	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Protokol
	PT. 06	3.	Audiensi	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Protokol

PT. 07	F. Ucapan	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Protokol
	1. Ucapan terima kasih				
	2. Ucapan selamat				
	3. Ucapan turut belasungkawa				
X. PL.	PERLENGKAPAN				
PL. 01	A. Pengadaan				
PL. 01.01	1. Alat tulis kantor	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Layanan Pengadaan
PL. 01.02	2. Alat Rumah Tangga Kantor (ARTK)	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Layanan Pengadaan
PL. 02	B. Penyimpanan				
PL. 02.01	1. Penerimaan	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Layanan Pengadaan
	- Pencatatan barang masuk/inventaris				
	- Buku penerimaan barang inventaris				
PL. 02.02	2. Persediaan Barang	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Layanan Pengadaan
	- Kartu persediaan barang				
	- Buku persediaan barang				
PL. 02.03	3. Laporan berkala	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Layanan Pengadaan
PL. 03	C. Distribusi				
	1. Pencatatan barang (SIMAK) dan pemberian barcode	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Layanan Pengadaan
	2. Surat permintaan	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Layanan Pengadaan
	3. Surat pengiriman barang	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Layanan Pengadaan
	4. Kartu pendistribusian	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Layanan Pengadaan
	5. Buku pendistribusian	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Layanan Pengadaan
PL. 04	D. Perbaikan dan Pemeliharaan				

		1.	Surat permintaan perbaikan	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Layanan Pengadaan
		2.	Surat perbaikan/perawatan	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Layanan Pengadaan
		3.	Buku pencatatan pemeliharaan	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Layanan Pengadaan
		4.	Buku barang rusak	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Layanan Pengadaan
		5.	Laporan berkala	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Layanan Pengadaan
PL. 05		E.	Pelayanan				
		1.	Pengelolaan ruang kerja	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Layanan Pengadaan
		2.	Pengelolaan ruang pertemuan/rapat/ lapangan upacara	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Layanan Pengadaan
		3.	Peminjaman sarana & prasarana kantor	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Layanan Pengadaan
XI.	RT.	KERUMAHTANGGAAN					
	RT. 01	A.	Pengelolaan Rumah Jabatan dan Wisma				
		1.	Pemeliharaan/perbaikan	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Wisma dan Rumah Jabatan
		2.	Administrasi peminjaman wisma	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Wisma dan Rumah Jabatan
RT. 02		B.	Pengelolaan Gedung dan Taman				
		1.	Rencana pembangunan gedung	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Duntam
		-	Blue print/peta/gambar-gambar gedung				
		2.	Pemeliharaan dan perbaikan	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Duntam
RT. 03		C.	Pengelolaan Instalasi/Jaringan				
		1.	Instalasi/jaringan (air, listrik, telepon, komputer dan Lokal Area Network (LAN))	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Istalasi
		2.	Jaringan instalasi/blue print/gambar (air, listrik dan telepon)	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Istalasi
RT. 04		D.	Pengelolaan Kendaraan Dinas				

		1.	Pengadaan	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Kendaraan
		2.	Pengurusan surat surat kendaraan dinas (STNK dan BPKB)	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Kendaraan
		3.	Pengelolaan kendaraan dinas	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Kendaraan
		4.	Pemeliharaan dan perbaikan	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Kendaraan
		5.	Kehilangan dan masalah kendaraan	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Kendaraan
		6.	Penggunaan kendaraan dinas	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Kendaraan
RT. 05		E. Pengelolaan Ketertiban dan Keamanan		Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Pamdal
		1.	Strategi keamanan				
		2.	Pengamanan, penjagaan dan pengawalan terhadap pejabat, kantor, dan rumah dinas				
		3.	Laporan ketertiban dan keamanan				
RT. 06		F. Pelayanan Kesehatan					
		1	Rekam medis Anggota	Rahasia	Pimpinan Tinggi Madya	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Bagian Yankes
		2	Rekam medis ASN	Rahasia	Pimpinan Tinggi Madya	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Bagian Yankes
		3	Rekam medis Non ASN	Rahasia	Pimpinan Tinggi Madya	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Bagian Yankes
		4	Resep Obat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Yankes

RT. 07		G. Pelayanan Pencetakan dan Penggandaan	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Penerbitan
XII. KN.		KEKAYAAN NEGARA				
KN. 01		A. Pengelolaan Barang Milik Negara				
		Perencanaan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara				
KN. 01.01		1. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian BMN
		a. Satker Dewan				
		b. Satker Sekretariat Jenderal				
KN. 01.02		2. Pemanfaatan Barang Milik Negara	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian BMN
		a. Usulan proses persetujuan pemanfaatan BMN (sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun serah guna / bangun guna serah)				
		b. Rekapitulasi data penerimaan PNBPN dari pemanfaatan BMN				
KN. 01.03		3. Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian BMN
		a. Satker Dewan				
		b. Satker Sekretariat Jenderal				
KN. 02		B. Penatausahaan BMN				
KN. 02.01		1 Inventaris BMN	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian BMN
KN. 02.02		2 Penghapusan Barang Milik Negara	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian BMN
KN. 02.03		3 Pelaksanaan Pelelangan BMN	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian BMN
KN. 02.04		4 Penetapan Status BMN	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian BMN
KN. 03		C. Pelaporan Barang Milik Negara				
KN. 03.01		1 Pembukuan Barang Milik Negara	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian BMN

			- Daftar barang kuasa/pengguna				
			- Daftar Inventaris Ruangan (DIR)				
			- Daftar barang lainnya				
			- Buku barang				
			- Buku Inventaris (BI)				
			- Kartu identitas barang				
			- Kartu Inventaris Ruangan (KIR)				
			- Kartu Inventaris Barang (KIB)				
			- Kartu Inventaris Laporan (KIL)				
KN. 03.02		2	Laporan Barang Milik Negara Semesteran dan Tahunan Un-Audited	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian BMN
			- Satker Dewan				
			- Satker Sekretariat Jenderal				
KN. 03.03		3	Laporan Barang Milik Negara Semesteran dan Tahunan Audited	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian BMN
			- Satker Dewan				
			- Satker Sekretariat Jenderal				
KN. 03.04		4	Laporan Barang Persediaan	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian BMN
			- Satker Sekretariat Jenderal				
KN. 04		D.	Bukti Kepemilikan Aset	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian BMN
		1	Sertifikat Tanah, IMB, Bukti Kepemilikan, SHM, dan sejenisnya				
		2	BPKB Kendaraan				
XIII. KU.			KEUANGAN				
KU.01		A	PENYUSUNAN ANGGARAN				
KU.01.01		1.	Rencana Strategis, Kebijakan umum dan strategi pengelolaan anggaran DPR RI.				
		a.	Rencana Strategis (Renstra) DPR RI.	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Perencanaan
		b.	Rencana Strategis (Renstra) Setjen DPR RI.	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Perencanaan
		c.	Arah kebijakan umum dan pengelolaan anggaran (AKUPA) Dewan	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Perencanaan

		d. Arah kebijakan umum dan pengelolaan anggaran (AKUPA) Setjen	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Perencanaan
		e. Pedoman umum Pengelolaan anggaran	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Perencanaan
KU.01.02		2. Dokumen penetapan kinerja (PK)	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Perencanaan
		- Surat permintaan data tentang PK				
		- Dokumen PK dari unit kerja				
		- Surat persetujuan tentang PK				
		- Penetapan Kinerja Pimpinan Unit Kerja				
KU.01.03		3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) DPR RI	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Perencanaan
KU.01.04		4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DPR RI	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Perencanaan
		- Surat permintaan data tentang RKT				
		- Dokumen RKT dari unit kerja				
		- Rencana kinerja tahunan (RKT) Setjen DPR RI				
KU.01.05		5. Perumusan program, kegiatan dan anggaran dan perumusan pelaksanaan perubahan anggaran.	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Perencanaan
		a. Usulan rencana kerja DPR RI	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Perencanaan
		- Usulan rencana kerja dan anggaran dari unit kerja (Unit Kerja AKD dan Setjen)				
		- Nota penjelasan Sekretaris Jenderal tentang usulan rencana kerja dan anggaran				
		- Dokumen usulan rencana kerja dan anggaran satker Dewan				
		- Dokumen usulan rencana kerja dan anggaran satker Setjen				
		- Usulan rencana kerja dan anggaran ke kementerian keuangan dan Bappenas				
		b. Rencana kerja (Renja) berdasarkan Pagu Indikatif	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Perencanaan
		- Surat edaran bersama tentang pagu indikatif dari kementerian keuangan dan Bappenas				
		- Anggaran yang telah disesuaikan dengan Pagu Indikatif dari unit kerja (AKD dan Setjen)				

				- Surat undangan tentang Trilateral meeting antara Bappenas, Kementerian Keuangan dan Setjen DPR RI				
				- Dokumen hasil pertemuan Trilateral Meeting				
				- Nota penjelasan tentang RKA berdasarkan Pagu Indikatif				
				- Dokumen Rencana kerja DPR RI satker Dewan berdasarkan pagu Indikatif				
				- Dokumen Rencana kerja DPR RI satker Setjen berdasarkan pagu Indikatif				
				- Surat pengajuan anggaran berdasarkan Pagu Indikatif ke Kementerian Keuangan dan Bappenas				
				c. Rencana kerja dan anggaran (RKA) DPR RI berdasarkan pagu anggaran	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Perencanaan
				- Pagu Anggaran dari Kementerian Keuangan				
				- Dokumen anggaran yang telah disesuaikan dengan pagu anggaran dari unit kerja (AKD dan Setjen)				
				- Nota penjelasan tentang RKA berdasarkan pagu anggaran				
				- Dokumen Rencana kerja DPR RI Satker Dewan berdasarkan pagu anggaran				
				- Dokumen Rencana kerja DPR RI Satker Setjen berdasarkan pagu anggaran				
				- Pengajuan anggaran berdasarkan pagu anggaran ke Kementerian Keuangan				
				d. Rencana kerja dan anggaran (RKA) DPR RI berdasarkan alokasi anggaran	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Perencanaan
				- Alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan				
				- Dokumen alokasi anggaran dari unit kerja (AKD dan Setjen)				
				- Nota penjelasan tentang RKA berdasarkan alokasi anggaran				
				- Dokumen Rencana kerja DPR RI satker Dewan berdasarkan alokasi Anggaran				
				- Dokumen Rencana kerja DPR RI satker Setjen berdasarkan alokasi anggaran				
				- Pengajuan anggaran berdasarkan alokasi anggaran ke Kementerian Keuangan				
				e. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DPR RI	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Perencanaan
				- Pengesahan DIPA dari dirjen anggaran				
				- Dokumen DIPA DPR RI Satker Dewan				
				- Dokumen DIPA DPR RI Satker Setjen				
				- Nota penjelasan Sekretaris Jenderal tentang DIPA				

			f. Rincian Anggaran Biaya (RAB) Revisi DIPA DPR RI	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat <u>mengganggu pelaksanaan</u>	Bagian Perencanaan
			- Pengajuan revisi dari unit kerja (AKD dan Setjen)				
			- Dokumen revisi DIPA DPR RI				
KU.01.06		6.	Dokumen standar harga satuan barang dan jasa	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Perencanaan
KU.01.07		7.	Dokumen perencanaan program dan anggaran lainnya.	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Perencanaan
			- Penyusunan RKA dan POK Setjen DPR RI				
			- Pedoman Teknis penyusunan anggaran Setjen DPR RI				
			- Laporan studi komparasi.				
KU. 02.		B	PELAKSANAAN ANGGARAN				
KU. 02.01.		1.	REALISASI PENDAPATAN				
		a.	Surat setoran pajak (SSP)	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Keuangan
		b.	Surat setoran bukan pajak (SSBP)	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Keuangan
		c.	Setoran pengembalian belanja (SSPB)	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Keuangan
		d.	Bukti penerimaan negara bukan pajak (PNBP)	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Keuangan
KU. 02.02.		2.	BELANJA				
		a.	Dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah dan lampiran	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Keuangan
		1)	Barang pakai habis (ATK, lampu, obat-obatan, dll)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Keuangan
		2)	Barang inventaris (belanja pengadaan/modal)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Keuangan
		3)	Belanja pemeliharaan, jamuan rapat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Keuangan
		4)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) UP/TUP dan lampirannya	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Keuangan
		b.	Pembukuan anggaran				

				1) Buku kas umum (BKU)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Keuangan
				2) Buku bantu bank	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Keuangan
				3) Buku kas pajak	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Keuangan
				4) Kartu pengawasan kredit anggaran	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan	Bagian Keuangan
				c. Daftar gaji Anggota DPR RI	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Keuangan
				d. Dokumen Akutansi Keuangan/Laporan arus kas:	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Keuangan
				- Berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi				
				- Kas/Register penutupan kas				
				- Laporan pertanggungjawaban bendaharawan pengeluaran				
				- Rekening koran bank				
				e. Daftar honorarium tenaga ahli anggota dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Keuangan
				f. Daftar honorarium asisten anggota DPR RI	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Keuangan
				g. Daftar tunjangan kehormatan anggota DPR RI	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Keuangan
				h. Daftar form A2 untuk anggota DPR RI	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Keuangan
				i. Daftar KP4 anggota DPR RI	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Keuangan

			j. Berkas pembayaran fungsi Dewan :	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Keuangan
			- Tunjangan rangkap jabatan				
			- Tunjangan komunikasi				
			- Tunjangan ketua fraksi				
			- Tunjangan ketua komisi				
			- Tunjangan fungsi anggaran				
			- Tunjangan fungsi pengawasan				
			- Tunjangan fungsi legislasi				
			k. Berkas pembayaran fasilitas anggota :	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Keuangan
			- Listrik dan telepon anggota DPR RI				
			- Kendaraan kredit anggota DPR RI				
			- Aspirasi masyarakat untuk anggota DPR RI				
			l. Gaji pegawai Setjen DPR RI	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Keuangan
			m. Daftar tunjangan kinerja pegawai Setjen DPR RI	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Keuangan
			n. Daftar form A2 pegawai Setjen DPR RI	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Keuangan
			o. Daftar KP.4 pegawai Setjen DPR RI	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Keuangan
			p. Honorarium :				
			- Daftar honorarium Tim kerja DPR RI	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Keuangan
			- Daftar honorarium Tim RUU	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Keuangan

				- Daftar honorarium Tim Setjen DPR RI	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Keuangan
				- Daftar honorarium uang makan nasional	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Keuangan
				q. Usulan revisi anggaran para PPK Satker Dewan dan Satker Setjen :	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Keuangan
				- Surat disposisi KPA atas usulan revisi dari PPK ke Biro				
				- Rincian anggaran biaya yang direvisi				
				- Term of references (TOR)				
				- Surat pernyataan tanggung jawab mutlak ditandatangani kuasa pengguna anggaran				
				- Surat pengesahan revisi kementerian keuangan				
				- Daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) yang sudah disahkan kementerian keuangan				
				- Rencana kerja anggaran /RKA-KL				
KU. 03.			3	SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)				
				a. Kebijakan akuntansi :	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Keuangan
				Berita acara rekonsiliasi internal antara SAK dan SIMAK-BMN (Satker dan Lembaga).				
				b. Laporan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara (SIMAK BMN) :	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Keuangan
				- Neraca barang milik negara				
				- Laporan barang nersediaan				
				- Laporan penggunaan barang				
				- Laporan Kondisi Barang				
				c. Laporan sistem akuntansi keuangan (SAK) :	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Keuangan
				- Neraca				
				- Laporan realisasi pendapatan				
				- Laporan realisasi anggaran				
				- Daftar transaksi harian pendapatan negara dan realisasi				
KU. 04.			4	BIAYA PERJALANAN DINAS				
				A. PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI				
KU. 04.01.				1) PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DEWAN				

			a) Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kelompok	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Perjalanan
			<ul style="list-style-type: none"> - Perjalanan Dinas Pimpinan - Perjalanan Dinas Komisi - Perjalanan Dinas Tim - Perjalanan Dinas Pelantikan - Perjalanan Dinas Pemulangan - Perjalanan Dinas Duka Wafat - Perjalanan Dinas Mengantar Jenazah - Perjalanan Dinas Lain yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan. 				
			b) Perjalanan Dinas Dalam Negeri Perorangan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Perjalanan
			<ul style="list-style-type: none"> - Kunjungan Kerja Ketua/Wakil Ketua - Kunjungan Kerja di Masa Reses - Kunjungan Kerja diluar Masa Reses dan diluar sidang - Kunjungan Kerja pada Masa Reses atau pada Masa - Kunjungan Spesifik Perorangan - Kunjungan Kerja Perorangan dalam rangka Sosialisasi 				
KU. 04.02.			2) PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI SEKRETARIAT	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Perjalanan
			<ul style="list-style-type: none"> - Perjalanan Dinas Tim. - Perjalanan Dinas DIKLAT. - Perjalanan Dinas Paket Meeting - Perjalanan Dinas Penelitian Kelompok - Perjalanan Dinas Penelitian Individu - Perjalanan Dinas Pakar 				
KU. 05.			B. PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI				
KU. 05.01.			1) PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DEWAN	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Perjalanan
			<ul style="list-style-type: none"> - Kunjungan Kerja Delegasi Muhibah Ketua dan Wakil - Kunjungan Kerja Pelaksanaan Kerjasama Organisasi - Penempatan Pelaksanaan Tugas BIIRT - Pelaksanaan Tugas Mahkamah Kehormatan Dewan - Pelaksanaan Kerjasama Organisasi Regional/KSR - Pelaksanaan Kerjasama Bilateral/KSR - Penyelenggaraan Sekretariat Organisasi - Dalam Rangka Pelaksanaan Peran Diplomasi/MINILINA - Kunjungan Kerja diluar Masa Reses dan diluar Sidang - Pelaksanaan Kegiatan Badan Anggaran - Peneawasan Pelaksanaan III dan Kebijakan Pemerintah - Tim Pengawasan Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja - Tim Pengawasan Ibadah Haji 				

KU. 05.02.			2) PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI SEKRETARIAT	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Perjalanan
			- Kunjungan Kerja Persidangan Komisi dan Paripurna				
			- Biro Kerja Sama Antar Parlemen				
			- Kesekretariatan Pimpinan				
			- Biro Keuangan Dan Perencanaan				
			- Inspektorat II				
			- Pusat Data Dan Informasi				
			- Bidang Arsin Dan Museum				
			- Perancang PUII				
			- Peneliti Pengkajian dan Pengembangan				
KU. 06.		C	PELAPORAN DAN EVALUASI				
KU. 06.01.		1.	Laporan Keuangan Dewan dan Satker				
		a.	Laporan Keuangan <i>Un-audited</i> (Lembaga, Satker Dewan dan Satker Setjen)	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Evapor
		b.	Laporan Audited (Lembaga, Satker Dewan dan Satker Setjen)	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Evapor
		c.	Laporan Keuangan Semester I (Lembaga, Satker Dewan dan Satker Setjen)	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Evapor
		d.	Laporan Keuangan Triwulan I dan Triwulan II (Lembaga, Satker Dewan dan Satker Setjen)	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Evapor
		e.	Laporan Keuangan Bulanan	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Evapor
KU. 06.02.		2.	Laporan Keuangan Tahunan DPR RI	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Evapor
			- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)				
			- Neraca				
			- Laporan Operasional				
			- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)				
			- Catatan atas Laporan Keuangan				
KU. 06.03.		3.	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI)	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Evapor

KU. 06.04.	4.	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi internal antara SAK dan SIMAK BMN (Satker dan Lembaga)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Evapor
KU. 06.05.	5.	Dokumen/Daftar Transaksi	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Evapor
		- Penerimaan, Pengeluaran dokumen sumber, bukti jurnal, Surat Tanda Setor, Surat Setor Bukan Pajak, SP2D, SPM				
KU. 06.06.	6.	Revisi Anggaran	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Evapor
		- Surat permintaan revisi dari unit kerja :				
		- Dokumen yang akan direvisi:				
		- Dokumen Revisi Satker Dewan:				
		- Dokumen Revisi Satker Setjen.				
KU. 06.07.	7.	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran :	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian Evapor
		- Laporan Realisasi Anggaran DPR RI				
		- Matriks realisasi anggaran Satker Dewan/Satker Setjen				
		- Nota Penjelasan Sekien terhadap realisasi Anggaran DPR RI				
KU. 06.08.	8.	Laporan Berkala	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bagian Evapor
		- Laporan triwulan PP 39 atau E-Monev Bappenas				
		- Laporan E-Monev DJA				
		- Matriks sandingan triwulan 1,2,3,4				
XIV. PN.		PENELITIAN				
PN. 01.	1.	Proposal Penelitian	Biasa	Pimpinan Tinggi Pratama	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Pusat Penelitian
PN. 01.01.	a.	Pemintaan Ketua DPR				
PN. 01.02.	b.	Kepakaran Peneliti				
PN. 01.03.	c.	Lintas Kepakaran				
PN. 02.	2.	Survey/Penyiapan Bahan/Data	Biasa	Pimpinan Tinggi Pratama	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Pusat Penelitian
PN. 03.	3.	Pengolahan /Analisis Data	Biasa	Pimpinan Tinggi Pratama	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Pusat Penelitian

PN. 04.	4.	Seminar/Workshop/Lokakarya	Biasa	Pimpinan Tinggi Pratama	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Pusat Penelitian
PN. 05.	5.	Hasil Penelitian	Biasa	Pimpinan Tinggi Pratama	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Pusat Penelitian
PN. 05.	6.	Penyajian Hasil Penelitian	Biasa	Pimpinan Tinggi Pratama	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Pusat Penelitian
		- Penerbitan Hasil Penelitian (Buku, Kajian, Info singkat, Parliamentary review, Jurnal)				
PN. 06.	7.	Berkas Pengukuhan Penghargaan Sebagai Profesor Riset	Biasa	Pimpinan Tinggi Pratama	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Pusat Penelitian
XV. KA.		KEARSIPAN				
		1. Pengelolaan Arsip Dinamis				
KA. 01.	a.	Penyusunan Sistem Kearsipan	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bidang Arsip dan Museum
		- Tata Naskah Dinas				
		- Pola Klasifikasi Arsip				
		- Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis				
		- Jadwal Retensi Arsip				
		- Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis				
KA. 02.	b.	Administrasi Pengurusan Surat	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bidang Arsip dan Museum
		- Buku Agenda Surat Masuk/Surat Keluar				
		- Buku Ekspedisi				
KA. 03.	c.	Pengelolaan Arsip Aktif	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bidang Arsip dan Museum
		- Daftar Arsip Aktif				
		- Daftar Arsip vital				
KA. 04.	d.	Pengelolaan Arsip Inaktif	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bidang Arsip dan Museum
		- Daftar Arsip Aktif				
		- Daftar Arsip Vital				
		- Daftar Arsip Teriaga				
		- Daftar Arsip Audio Visual				
		- Daftar Arsip Elektronik				
KA. 05.	e.	Pembinaan Kearsipan	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bidang Arsip dan Museum

			<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan / Bimkos - Bimbingan Teknis - Verifikasi SKP / PPKP - Workshop, Apresiasi, Lokakarya, Sosialisasi - Sertifikasi Arsiparis 				
		f.	Monitoring Supervisi dan Pengawasan Kearsipan	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bidang Arsip dan Museum
KA. 06.		2.	Penggunaan dan Pemeliharaan				
KA. 06.01.		a.	Layanan arsip	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bidang Arsip dan Museum
KA. 06.02.		b.	Pameran Arsip	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bidang Arsip dan Museum
KA. 06.03.		c.	Perawatan Arsip	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bidang Arsip dan Museum
KA. 07.		3.	Penyusutan Arsip				
KA. 07.01.		a.	Pemindahan arsip inaktif	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bidang Arsip dan Museum
			<ul style="list-style-type: none"> - Daftar Arsip - Berita Acara 				
KA. 07.02.		b.	Pemusnahan arsip	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bidang Arsip dan Museum
			<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Panitia - Daftar Arsip - Surat Rekomendasi - Surat Keputusan - Berita Acara 				
KA. 07.03.		c.	Penyerahan arsip statis	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bidang Arsip dan Museum
			<ul style="list-style-type: none"> - Penilaian Arsip - Daftar Arsip - Berita Acara 				
XVI. MS.			KEMUSEUMAN				
MS. 01.		1.	Pengelolaan Koleksi	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bidang Arsip dan Museum

MS. 02.	2.	Pengadaan koleksi	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bidang Arsip dan Museum
MS. 03.	3.	Registrasi dan inventarisasi Koleksi	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bidang Arsip dan Museum
MS. 04.	4.	Pemeliharaan dan pengamanan koleksi	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bidang Arsip dan Museum
MS. 05.	5.	Penelusuran koleksi	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bidang Arsip dan Museum
MS. 06.	6.	Penyajian koleksi	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bidang Arsip dan Museum
MS. 07.	7.	Layanan Kunjungan Museum	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bidang Arsip dan Museum
XVII. TI.		TEKNOLOGI INFORMASI				
TI. 01.	1.	Jaringan				
		a. Pengembangan jaringan baru	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	BDTI
		b. Pengembangan jaringan yang sudah ada	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	BDTI
		c. Perbaikan jaringan (<i>trouble shooting</i>)	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	BDTI
TI. 02.	2.	Aplikasi/data				
TI. 02.01.		a. Rencana strategis/master plan pembangunan system informasi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	BDTI
TI. 02.02.		b. Pembuatan aplikasi, database dan website	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	BDTI
TI. 02.03.		c. Pengembangan aplikasi, database dan website	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	BDTI
TI. 02.04.		d. Pemeliharaan, database dan website	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	BDTI
TI. 02.05.		e. SPBE	Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	BDTI

Tl. 03.	3. Database					
	a. Pengadaan baru		Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	BDTI
	b. Pengembangan (penambahan perangkat)		Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	BDTI
	c. Pemeliharaan		Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	BDTI
Tl. 04.	4. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)					
	a. Verifikasi dokumen		Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	BDTI
	b. Administrasi lelang		Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	BDTI
	c. Arsip data komputer		Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	BDTI
XVIII. PS.	KEPUSTAKAAN					
PS. 01.	1. Pengadaan bahan pustaka		Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bidang Perpustakaan
PS. 02.	2. Pemeliharaan bahan pustaka		Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bidang Perpustakaan
PS. 03.	3. Pelayanan bahan pustaka		Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bidang Perpustakaan
PS. 04.	4. Pameran bahan pustaka		Biasa	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja DPR RI	Bidang Perpustakaan
XIX. PI.	PENGAWASAN					
Pl. 01.	1. Audit (surat tugas, surat pemberitahuan, telaahan, sampai dengan laporan)					
Pl. 01.01.	a. Audit Kinerja/Operasional		Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian ITTAMA


PI. 01.02.		b.	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian ITTAMA
PI. 01.03.		c.	Audit Berbasis Risiko	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian ITTAMA
PI. 02.		2.	Reviu (surat tugas, surat pemberitahuan, sampai dengan laporan)				
PI. 02.01.		a.	Reviu Laporan Keuangan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian ITTAMA
PI. 02.02.		b.	Reviu Pengelolaan Anggaran (RAKL)/PI/PA/AA	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian ITTAMA
PI. 02.03.		c.	Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian ITTAMA
PI. 02.04.		d.	Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian ITTAMA
PI. 02.05.		e.	Reviu Piutang	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian ITTAMA
PI. 02.06.		f.	Reviu Penghapusan Aset	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian ITTAMA
PI. 02.07.		g.	Reviu Laporan Akuntabilitas Keuangan (LAK)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian ITTAMA
PI. 03.		3.	Evaluasi (surat tugas, surat pemberitahuan, sampai dengan laporan)				
PI. 03.01.		a.	Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian ITTAMA
PI. 03.02.		b.	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian ITTAMA
PI. 03.03.		c.	Evaluasi Kinerja pada Unit Kerja	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian ITTAMA

Pl. 03.04.		d.	Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risk Register Un	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian ITTAMA
Pl. 03.05.		e.	Evaluasi atas Unit Kerja yang telah di tetapkan sebagai Zona Integ	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian ITTAMA
Pl. 03.06.		f.	Evaluasi rencana strategis (Renstra) Setjen DPR RI	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian ITTAMA
Pl. 04.		4.	Pemantauan				
Pl. 04.01.		a.	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian ITTAMA
Pl. 04.02.		b.	Pemantauan Strategi Nasional (Stranas) PK	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian ITTAMA
Pl. 04.03.		c.	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) BPK RI	Terbatas	Pimpinan Tinggi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian ITTAMA
Pl. 04.04.		d.	Pemantauan disiplin pegawai	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian ITTAMA
Pl. 05.		5.	Pengawasan lainnya				
Pl. 05.01.		a.	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian ITTAMA
Pl. 05.02.		b.	Pemenuhan Area of Improvement Internal Audit Capability Model (I	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian ITTAMA
Pl. 05.03.		c.	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian ITTAMA
Pl. 05.04.		d.	Penyusunan Risk Register	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian ITTAMA
Pl. 05.05.		e.	Pendampingan				

			1. Pendampingan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian ITTAMA
			2. Pendampingan PMPRB	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian ITTAMA
			3. Pendampingan SPIP	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian ITTAMA
			4. Pendampingan LHKPN	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian ITTAMA
			5. Pendampingan LHKSN	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian ITTAMA
PI. 05.06.	f.		Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian ITTAMA
PI. 05.07.	g.		Pembinaan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian ITTAMA
PI. 05.08.	h.		Rapat kerja pengawasan (Rakerwas) /rapat koordinasi pengawasan (Rakorwas)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian ITTAMA
PI. 05.09.	i.		Kebijakan pengawasan/Rencana Strategis Pengawasan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian ITTAMA
PI. 05.10.	j.		Penyusunan Usulan Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (UPKPT/PKPT)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian ITTAMA
PI. 05.11.	k.		Pengawasan melekat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian ITTAMA
PI. 06.	6. Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan						
	a.		Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester (IHPS)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian ITTAMA

		b.	Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian ITTAMA
Pl. 07.		7.	Penerapan Aksi Pencegahan, Pemberantasan Korupsi				
		a.	Pengendalian gratifikasi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian ITTAMA
		b.	Zona integritas wilayah bebas korupsi, wilayah bersih bebas melay	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian ITTAMA
		c.	Pengendalian sistem pengendalian internal pemerintah	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian ITTAMA
		d.	Proses pengumpulan laporan hasil kekayaan pejabat negara	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian ITTAMA
		e.	Laporan hasil kekayaan aparat sipil negara	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian ITTAMA
		f.	<i>Whistle Blowing System</i> (WBS)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	Bagian ITTAMA

SEKRETARIS JENDERAL,


 INDRAS KANDAR
 NIP. 196611141997031001